

Editor:

**Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph.D., APU.**

# **PERKEMBANGAN INFLASI DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH**



Diterbitkan oleh:  
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
dan PT Balai Pustaka (Persero)



## PERKEMBANGAN INFLASI DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH

Editor Ahli: Carunia Mulya Firdaus  
Editor: Tim Balai Pustaka  
Penata Letak: Tim Balai Pustaka  
Perancang Sampul: Aly Ibnu Husein

Cetakan Kesatu, 2016  
@Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Diterbitkan oleh  
Penerbitan dan Percetakan  
**PT Balai Pustaka (Persero)**  
Jalan Bunga No. 8-8A  
Matraman, Jakarta Timur 13140  
Tel. (021) 8583369. Faks. (021) 29622129  
Website: <http://www.balaipustaka.co.id>

332.41

r Rivani, Edmira, dkk  
p **Perkembangan Inflasi dan Peran Pemerintah Daerah/Edmira Rivani, dkk. – cet. ke- 1 – Jakarta: Balai Pustaka, 2016.**  
xx 146 hlm.; 14,8 × 21 cm. – (Seri BP No. 6658)  
1. Perkembangan Inflasi dan Peran Pemerintah Daerah  
I. Juli Panglima Saragih II. Rasbin III. Ari Mulianta Ginting  
EAN 978-602-260-104-3

### Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## KATA SAMBUTAN

Pertama-tama, Kami menyambut gembira atas terbitnya buku dengan judul “Perkembangan Inflasi dan Peran Pemerintah Daerah” yang ditulis oleh para peneliti Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian (Puslit).

Buku ini terdiri dari empat bagian, *pertama*, mengungkapkan upaya stabilisasi Harga Pangan Dalam Rangka Mengendalikan Inflasi. Beberapa hal yang dibahas adalah karakteristik komoditas pangan dan kebijakan pengendalian harga komoditas pangan dan pengendalian inflasi. *Kedua* mendiskusikan dan membahas kebijakan dan peran pemerintah daerah dalam mengurangi inflasi. Adapun kebijakan yang dibahas dalam bagian ini yakni kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi serta peran Tim Pengendali Inflasi Daerah dengan segala masalahnya. Kemudian Bagian *ketiga* didiskusikan pengendalian inflasi daerah dan desentralisasi fiskal. Adapun yang dibahas meliputi perkembangan inflasi dan determinannya, program pengendalian inflasi, dan peran desentralisasi fiskal terhadap pengendalian inflasi. Sementara bagian *keempat* membahas tentang strategi kebijakan pengelolaan dan *forecasting* inflasi. Dalam bagian ini dibahas antara lain tentang faktor determinasi inflasi, perkembangan inflasi, strategi inflasi dan bagaimana melakukan *forecasting* terhadap inflasi yang terjadi di suatu daerah.

Dengan diterbitkannya buku ini, semoga memberikan sumbangan pemikiran tentang inflasi dalam perekonomian

Indonesia. Dengan membaca buku ini, pengetahuan pembaca tidak saja dapat menjadi bertambah, tetapi juga semakin dalam dan tajam. Namun harus diakui bahwa informasi dan analisis yang dikemukakan dalam buku ini masih relatif terbatas sehingga memerlukan kehati-hatian dan tambahan data dan informasi serta penggunaan metode analisis lebih lanjut dalam menjustifikasi fakta dan isu yang dikemukakan di dalam buku ini.

Akhirnya, saya mengapresiasi setinggi-tingginya atas penerbitan buku ini, dan mengucapkan terima kasih kepada para peneliti Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik yang telah berupaya menuangkan pemikirannya dalam buku ini, serta berharap semoga di masa mendatang peneliti Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik dapat menghasilkan buku-buku yang lebih berkualitas.

Jakarta, September 2016  
Kepala Pusat Penelitian (Puslit), Badan Keahlian DPR RI

**Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si**

## PROLOG

Inflasi merupakan salah satu masalah yang dapat mengganggu keberlanjutan perekonomian suatu negara. Indonesia telah beberapa kali menghadapi masalah inflasi dan nyaris membangkrutkan perekonomian nasional. Pengalaman inflasi buruk dimaksud yakni pada saat Indonesia mengalami empat krisis. Pertama, inflasi sebagai akibat krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1960. Tepatnya pada tahun 1964 yang mencapai angka 135 persen, kemudian meningkat lebih parah lagi mencapai hampir 600 persen tahun 1965. Kedua, inflasi sebagai akibat krisis ekonomi pasca era bom minyak bumi tahun 1982. Ketiga, inflasi yang terjadi sebagai akibat krisis keuangan Asia tahun 1997/1998. Keempat, inflasi sebagai akibat bangkrutnya institusi keuangan global *Lehman Brothers* pada tahun 2008 atau yang dikenal dengan *Global Financial Crisis* (Baca Thee Kian Wie, 2010).

Akibat dari inflasi tersebut, pertumbuhan ekonomi nasional yang tadinya mencapai rata-rata 7 persen per tahun, misalnya, pada era Orde Baru (1970-1996) menurun tajam menjadi minus 13 persen pada tahun 1998. Demikian pula dengan inflasi yang terjadi sebagai akibat krisis keuangan global yang menurunkan pertumbuhan ekonomi dari rata-rata 6 persen sejak periode 2004-2007 menurun menjadi dibawah 5 persen. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah memiliki perhatian besar terhadap inflasi.

Paling tidak terdapat 4 faktor penyebab inflasi. Pertama, *cost push inflation* yakni inflasi yang disebabkan naiknya harga barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi. Kedua, *demand pull inflation* yakni inflasi yang disebabkan naiknya satu, kombinasi atau seluruh variabel dalam *aggregate demand* (konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, net ekspor) melebihi *aggregate supply*. Ketiga, inflasi yang disebabkan oleh adanya ekspektasi masyarakat dan/atau pelaku ekonomi terhadap kemungkinan adanya kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dalam periode tertentu (*Expected Inflation*). Keempat, inflasi yang disebabkan oleh depresiasi nilai tukar dan atau kenaikan harga barang impor (*Import Inflation*).

Perhatian pemerintah terhadap inflasi dengan segala masalahnya tersebut sejak era reformasi dan desentralisasi tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan Bank Indonesia saja. Pemerintah dan Bank Indonesia kini telah membentuk Tim Pemantauan dan Pengendali Inflasi (TPI) di level pusat sejak tahun 2005. Penguatan koordinasi kemudian dilanjutkan dengan membentuk Tim Pengendali Inflasi di level daerah (TPID) pada tahun 2008. Selanjutnya, untuk menjembatani tugas dan peran TPI di level pusat dan TPID di daerah, maka pada bulan Juli 2011 dibentuk Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID yang diharapkan dapat menjadi katalisator yang dapat memperkuat efektivitas peran TPID. Keanggotaan Pokjanas TPID ini adalah Bank Indonesia, Kemenko Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri (Bank Indonesia, 2015).

Namun sayangnya studi yang mengungkapkan dan membahas secara komprehensif inflasi dengan segala masalahnya di daerah belum banyak dilakukan terutama setelah kebijakan pengendalian inflasi di daerah ditetapkan. Jika pun kajian atau studi tersebut tersedia, pembahasan dan analisis serta penulisan dari masalah inflasi di daerah masih terbatas pada aspek-aspek tertentu dan atau

ditulis secara parsial. Akibatnya, pemahaman tentang strategi dan kebijakan pengendalian inflasi di daerah menjadi tidak utuh dan tajam. Bertolak dari terbatasnya data dan informasi menyangkut inflasi di daerah dengan segala masalahnya, maka penulisan buku ini dirasakan perlu. Diharapkan dengan adanya buku ini, tidak saja berbagai persoalan menyangkut inflasi khususnya di daerah tidak saja dapat dipahami, melainkan juga yang terpenting dapat di atasi oleh pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan Pemerintah serta pihak yang berkepentingan lainnya.

Secara lebih spesifik buku ini bertujuan mendiskusikan dan membahas empat (4) isu terkait inflasi. Keempat isu dimaksud adalah sebagai berikut. *Pertama*, menyangkut strategi kebijakan pengelolaan dan *forecasting* inflasi di daerah. *Kedua*, berkaitan dengan Stabilisasi Harga Pangan Dalam Rangka Mengendalikan Inflasi. *Ketiga*, isu terkait pengendalian inflasi daerah dan desentralisasi fiskal. *Keempat*, menyangkut kebijakan dan peran pemerintah daerah dalam mengurangi inflasi.

Dalam pembahasan keempat isu di atas, hasil penelitian lapangan di provinsi D.I. Yogyakarta dan Provinsi Papua Barat dijadikan rujukan dalam penulisan buku ini. Dipilihnya provinsi D.I. Yogyakarta, karena provinsi ini merupakan salah satu provinsi yang berhasil mengelola inflasinya dengan cukup baik. Sedangkan dipilihnya provinsi Papua Barat antara lain disebabkan wilayah tersebut sulit dijangkau yang mengakibatkan adanya kendala dari sisi *supply*.

Seperti dijelaskan, inflasi atau *inflation* dapat diartikan sebagai kenaikan dari harga yang terjadi secara terus menerus, memengaruhi individu, pengusaha dan pemerintah dimana meningkatnya harga-harga tersebut terjadi secara umum. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan

kenaikan harga) pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Inflasi juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses ketidakseimbangan (*disequilibrium*) yang mana tingkat harga yang terus menerus mengalami peningkatan selama periode tertentu.

Kenaikan harga-harga yang menjadi penyebab terjadinya inflasi dapat diklasifikasikan dan jika harga-harga naik secara perlahan-lahan maka inflasi yang terjadi disebut sebagai "*Creeping Inflation*". Jika harga-harga meningkatnya secara cepat maka kondisi tersebut disebut sebagai "*Hyperinflation*" atau inflasi yang melebihi 50 persen per bulan atau lebih dari 1 persen per hari.

Inflasi secara umum menggunakan indikator yang disebut dengan istilah *Consumer Price Index* (CPI) atau Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK ini menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Di Indonesia, IHK ini diperoleh melalui survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Biasanya BPS memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota baik pasar tradisional maupun modern.

Selain IHK, indikator lainnya yang dapat digunakan untuk menggambarkan inflasi berdasarkan *International Best Practice* adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) dan Deflator Produk Domestik Bruto (PDB). Harga Perdagangan Besar dari suatu komoditas adalah harga transaksi yang terjadi antara penjual/pedagang besar pertama dengan pembeli/pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama atas suatu komoditas. Sedangkan Deflator PDB menggambarkan pengukuran level harga barang akhir (*final goods*) dan jasa yang diproduksi di dalam suatu ekonomi (negeri). Deflator PDB dihasilkan dengan membagi PDB atas dasar harga nominal dengan PDB atas dasar harga konstan.

Selain IHK, IHPB dan Deflator PDB, inflasi juga dapat diukur menggunakan indikator Indeks Biaya Hidup (IBH). IBH adalah biaya untuk memperoleh tingkat utilitas yang ada pada harga yang berlaku sekarang relatif terhadap biaya untuk memperoleh utilitas yang sama pada harga tahun dasar. Dari indikator-indikator inflasi tersebut, masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan, serta sangat tergantung pada tujuan pemakaiannya.

Bila dimaksudkan untuk penetapan upah buruh riil, lebih tepat digunakan IBH atau IHK, sedangkan bila dimaksudkan untuk pembuatan kontrak-kontrak kerja dan penyesuaian harga bagi kontrak yang dilakukan kontraktor besar, biasanya digunakan IHPB. Deflator PDB, cakupannya lebih luas dibandingkan indikator-indikator inflasi lainnya, sebenarnya mencerminkan perkembangan tingkat harga umum.

Berdasarkan *The Classification of Individual Consumption by Purpose* atau COICOP, inflasi dapat dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) kelompok pengeluaran yaitu kelompok bahan makanan; kelompok makanan jadi, minuman dan tembakau; kelompok perumahan; kelompok sandang, kelompok kesehatan; kelompok pendidikan dan olah raga; dan kelompok transportasi dan komunikasi.

Saat ini BPS juga sudah mengelompokkan inflasi yang dikenal dengan nama disagregasi inflasi. Disagregasi inflasi ini untuk menghasilkan suatu indikator inflasi yang lebih menggambarkan pengaruh dari faktor yang bersifat fundamental. Disagregasi inflasi di Indonesia dikelompokkan menjadi inflasi inti dan inflasi non inti. Inflasi inti yaitu komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten (*persistent component*) di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental seperti interaksi permintaan-penawaran, lingkungan eksternal: nilai tukar, harga komoditi internasional, inflasi mitra dagang, dan ekspektasi Inflasi dari pedagang dan konsumen.

Inflasi non inti yaitu komponen inflasi yang cenderung tinggi volatilitasnya karena dipengaruhi oleh selain faktor fundamental. Komponen inflasi non inti terdiri dari:

**a. Inflasi Komponen Bergejolak (*Volatile Food*)**

Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh *shocks* (kejutan) dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional.

**b. Inflasi Komponen Harga yang diatur Pemerintah (*Administered Prices*)**

Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh *shocks* (kejutan) berupa kebijakan harga Pemerintah, seperti harga BBM bersubsidi, tarif listrik, tarif angkutan, dan lain-lain.

Kenaikan harga-harga barang dan jasa yang tinggi dan terus menerus tidak hanya menimbulkan beberapa efek negatif terhadap kegiatan ekonomi, tetapi juga tingkat kesejahteraan individu dan masyarakat. Tingkat inflasi yang tinggi pastinya tidak akan menggalakkan perkembangan ekonomi suatu negara. Biaya yang terus menerus naik menyebabkan kegiatan produktif menjadi tidak menguntungkan. Akibatnya pemilik modal lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi. Antara lain membeli harta-harta tetap seperti tanah, rumah dan bangunan. Akibatnya investasi produktif akan berkurang dan tingkat kegiatan ekonomi akan menurun. Dampak akhirnya adalah tingkat pengangguran dan kemiskinan akan meningkat.

Di samping menimbulkan efek negatif terhadap kegiatan ekonomi nasional, inflasi juga akan menimbulkan efek-efek negatif terhadap individu dan masyarakat, seperti:

**1. Inflasi akan menurunkan pendapatan riil orang-orang yang berpendapatan tetap**

Pada umumnya kenaikan upah tidaklah secepat kenaikan harga-harga. Ketika terjadi inflasi maka inflasi akan menurunkan upah riil individu-individu yang berpendapatan tetap.

**2. Inflasi akan mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang**

Sebagian kekayaan masyarakat disimpan dalam bentuk uang. Simpanan di bank, simpanan tunai, dan simpanan dalam institusi-institusi keuangan lain merupakan simpanan keuangan. Nilai riilnya akan menurun apabila terjadi kenaikan inflasi.

**3. Memperburuk pembagian kekayaan**

Telah ditunjukkan bahwa penerima pendapatan tetap akan menghadapi kemerosotan dalam nilai riil pendapatannya, dan pemilik kekayaan bersifat keuangan mengalami penurunan dalam nilai riil kekayaannya. Akan tetapi pemilik harta-harta tetap seperti tanah, bangunan dan rumah dapat mempertahankan atau menambah nilai riil kekayaannya. Juga sebagian penjual/pedagang dapat mempertahankan nilai riil pendapatannya. Dengan demikian inflasi menyebabkan pembagian pendapatan di antara golongan berpendapatan tetap dengan pemilik-pemilik harta tetap dan penjual/pedagang akan menjadi semakin tidak merata.

Sistematika penulisan buku ini terdiri dari empat bagian. Bagian kesatu mengungkapkan upaya stabilisasi Harga Pangan Dalam Rangka Mengendalikan Inflasi. Beberapa hal yang dibahas adalah karakteristik komoditas pangan dan kebijakan pengendalian harga komoditas pangan dan pengendalian inflasi. Bagian kedua

mendiskusikan dan membahas kebijakan dan peran pemerintah daerah dalam mengurangi inflasi. Adapun kebijakan yang dibahas dalam bagian ini yakni kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dalam mengendalikan inflasi serta peran Tim pengendali Inflasi Daerah dengan segala masalahnya. Kemudian Bagian ketiga didiskusikan pengendalian inflasi daerah dan desentralisasi fiskal. Adapun yang dibahas meliputi perkembangan inflasi dan determinannya, program pengendalian inflasi, dan peran desentralisasi fiskal terhadap pengendalian inflasi. Terakhir, Bagian keempat membahas tentang strategi kebijakan pengelolaan dan *forecasting* inflasi. Dalam bagian ini dibahas antara lain tentang faktor determinasi inflasi, perkembangan inflasi, strategi inflasi dan bagaimana melakukan *forecasting*.

Jakarta, September 2016

**Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph.D., APU.**

## DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN .....	iii
PROLOG .....	v
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xvii
DAFTAR GAMBAR .....	xix
BAGIAN KESATU	
STABILISASI HARGA PANGAN DALAM RANGKA	
MENGENDALIKAN INFLASI .....	
Oleh: Edmira Rivani .....	1
I. PENDAHULUAN .....	
II. INFLASI PANGAN DI INDONESIA .....	5
III. KARAKTERISTIK KOMODITI PANGAN .....	8
IV. PRIORITAS KOMODITI PANGAN DALAM KEBIJAKAN	
PENGENDALIAN HARGA .....	10
V. KEBIJAKAN PENGENDALIAN HARGA KOMODITAS	
PANGAN DAN PENGENDALIAN INFLASI .....	19
VI. PENUTUP .....	25
DAFTAR PUSTAKA .....	28

## BAGIAN KEDUA

### PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJAGA STABILITAS HARGA BARANG

Oleh: Juli Panglima Saragih .....	31
I. PENDAHULUAN .....	33
II. INDIKATOR UMUM INFLASI .....	35
III. DAMPAK INFLASI .....	36
VI. UPAYA PENGENDALIAN INFLASI .....	38
V. PEMERINTAH DAERAH: PENTINGNYA MENJAGA STABILITAS HARGA .....	42
VI. PENUTUP .....	64
DAFTAR PUSTAKA .....	66

## BAGIAN KETIGA

### PENGENDALIAN INFLASI DAERAH DAN PERAN DESENTRALISASI FISKAL

Oleh: Rasbin .....	71
I. PENDAHULUAN .....	73
II. PERKEMBANGAN INFLASI DAN DETERMINANNYA .....	77
III. PROGRAM PENGENDALIAN INFLASI .....	81
IV. PERAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PENGENDALIAN INFLASI.....	87
J. PENUTUP .....	90
DAFTAR PUSTAKA .....	92

BAGIAN KEEMPAT	
KEBIJAKAN PENGELOLAAN DAN FORECASTING INFLASI	
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	
Oleh: Ari Mulianta Ginting .....	95
I. PENDAHULUAN .....	97
II. FAKTOR-FAKTOR DETERMINAN INFLASI .....	100
III. PERKEMBANGAN INFLASI DAN STRATEGI PENGENDALIAN INFLASI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY) .....	108
IV. <i>FORECASTING</i> JANGKA PENDEK INFLASI DI PROVINSI DIY .....	116
V. PENUTUP.....	124
DAFTAR PUSTAKA .....	125
EPILOG.....	129
INDEKS .....	137
BIOGRAFI PENULIS.....	141
BIOGRAFI EDITOR.....	145



## DAFTAR TABEL

### BAGIAN PERTAMA

Tabel 1	Perbandingan Kelembagaan Stabilisasi Pangan Negara ASEAN .....	7
Tabel 2	Rata-Rata Pangsa Pengeluaran Masyarakat Terhadap Pangan Berdasarkan Kelompok Pendapatan.....	8
Tabel 3	Andil Inflasi Komoditi Selama Tahun 2009-2014....	13
Tabel 4	Andil Inflasi, Koefisien Variasi Harga Tingkat Konsumen, Pangsa Pengeluaran Rumah Tangga.....	15

### BAGIAN KEDUA

Tabel 1	Inflasi di Indonesia Tahun 2008-2015 (%).....	48
Tabel 2	Laju Inflasi Tahun ke Tahun Gabungan dari 82 Kota di Indonesia, (2012=100).....	49
Tabel 3	Indeks Harga Konsumen (IHK) di 82 kota di Indonesia Hasil Survey BPS Tahun 2013 dan 2014 (2012=100).....	52
Tabel 4	Permasalahan dan Upaya dalam Mengatasi Inflasi.	58

## BAGIAN KEEMPAT

Tabel 1	Fokus TPID DIY Dalam Mengendalikan Inflasi.....	114
Tabel 2	Mekanisme Pelaksanaan Program Kerja 5 P.....	115
Tabel 3	Modal ARIMA untuk Inflasi.....	120

## DAFTAR GAMBAR

### BAGIAN PERTAMA

Gambar 1	Kontribusi IHK Indonesia.....	4
Gambar 2	Perbandingan Inflasi Bahan Makanan dan Beras Negara ASEAN .....	6
Gambar 3	Perkembangan Harga Komoditi Pangan .....	9

### BAGIAN KEDUA

Gambar 1	TPID di Beberapa Daerah di Indonesia.....	47
----------	---	----

### BAGIAN KETIGA

Gambar 1	Perkembangan Inflasi Nasional, DI Yogyakarta, dan Papua Barat Periode Januari 2013 – Mei 2016.....	78
Gambar 2	Perkembangan Persentase DAU terhadap Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi dan Kab/Kota D.I. Yogyakarta .....	88

## BAGIAN KEEMPAT

Gambar 1	Pekembangan Inflasi Nasional dan Provinsi D.I. Yogyakarta Periode Tahun 2009-2015.....	99
Gambar 2	<i>Demand Pull Inflation dan Cost Push Inflation</i> .....	103
Gambar 3	Permintaan dan Penawaran Agregat dan Kurva <i>Phillips</i> .....	105
Gambar 4	Peningkatan Jumlah Uang Beredar dan Inflasi.....	106
Gambar 5	Faktor-Faktor Determinasi Inflasi .....	107
Gambar 6	Karakteristik Inflasi- Disagregasi Provinsi D.I. Yogyakarta .....	109
Gambar 7	Komponen Penyumbang Inflasi di Provinsi D.I. Yogyakarta .....	110
Gambar 8a	<i>Autocorrelation for Inflation</i> .....	119
Gambar 8b	<i>Autocorrelation for Difference of Inflation</i> .....	119
Gambar 8c	<i>Partial Autocorrelation for Difference of Inflation</i> .....	120
Gambar 9	<i>Forecasting/Peramalan Inflasi</i> D.I. Yogyakarta untuk beberapa periode ke depan (dalam Persentase) .....	123

### **III. PERKEMBANGAN INFLASI DAN STRATEGI PENGENDALIAN INFLASI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY)**

#### **A. Perkembangan Inflasi di Provinsi DIY**

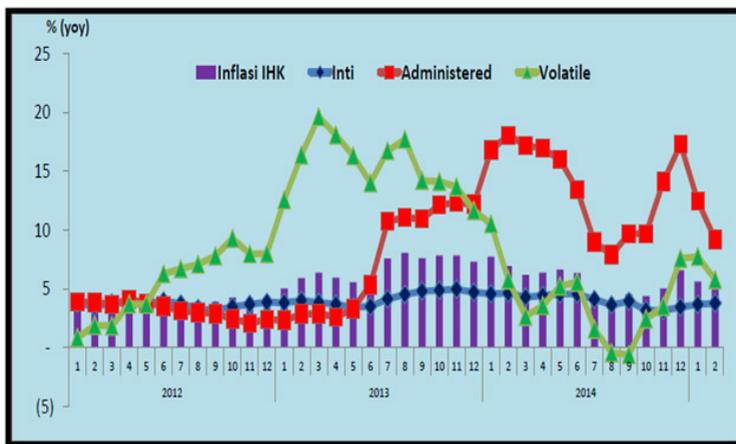
Inflasi DIY pada tahun 2015 tercatat sebesar 3,09% (yoy) dan merupakan terendah sejak empat tahun terakhir. Berbeda dengan dua tahun terakhir sebelumnya yaitu tahun 2013 dan 2014, inflasi di tahun 2015 mengalami tren penurunan seiring dengan melambatnya konsumsi masyarakat. Hal ini sebagai dampak dari perlambatan ekonomi nasional. Turunya inflasi terutama dipengaruhi oleh kelompok administered price yaitu akibat base effect kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada akhir tahun 2014 serta turunnya harga BBM jenis Premium dan Solar pada akhir tahun 2015 sebagai akibat penurunan harga minyak dunia.

Sumber inflasi DIY pada tahun 2015 terutama berasal dari kenaikan tarif listrik, bahan makanan, makanan jadi dan tarif transportasi. Kenaikan tarif listrik mendorong kenaikan inflasi kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar sebesar 4,41% dengan sumbangan sebesar 1,17% (yoy). Pemerintah menaikkan tarif listrik untuk daya 1.300 VA dan 2.200VA per 1 Desember 2015 yaitu sebesar Rp1.509,38 per KWh dimana sebelumnya sebesar Rp1.352 per KWh.

Sementara itu komponen inflasi yang berasal dari bahan makanan dan makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau meningkat akibat kenaikan permintaan masyarakat, masing-masing sebesar 4,64% (yoy) dan 5,04% (yoy). Harga komoditas bahan makanan terutama bawang merah, telur ayam ras, cabe merah dan cabe rawit. Berkurangnya ketersediaan pasokan kelompok hortikultur akibat mulai memasuki musim penghujan merupakan penyebab meningkatnya harga komoditas tersebut.

Berdasarkan disagregasinya, perkembangan inflasi di Provinsi DIY pada periode tahun 2012 sampai dengan tahun

2015 dipengaruhi oleh pergerakan harga kelompok *administered price* dan *volatile food* (Lihat Gambar 6). Jadi dapat disimpulkan bahwa inflasi di DIY pada periode tersebut lebih disebabkan oleh kenaikan harga barang yang diatur oleh pemerintah.. Sementara komponen *volatile food* yang berpengaruh menunjukkan tren kenaikan akibat dari *excess demand* sementara *supply* dari barang tersebut cenderung tetap. Sehingga kombinasi dari dua faktor tersebut mendorong pergerakan peningkatan inflasi di DIY.



Sumber : BPS (2016).

**Gambar 6 . Karateristik Inflasi- Disagregasi Provinsi D.I. Yogyakarta**

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kenaikan inflasi yang terjadi di Provinsi D.I. Yogyakarta berasal lebih dari 50% disumbang oleh komponen *administered prices* dan *volatile food*. Komponen penyumbang inflasi yang berasal dari *volatile food* berasal dari fluktuasi dari harga cabe merah, cabe rawit, beras dan harga daging ayam. Sedangkan komponen *administered prices* yang disumbangkan oleh fluktuasi harga dari Bensin, tarif listrik, angkutan kota dan harga gas 3 kg<sup>18</sup>. Untuk lebih

lengkap mengenai komponen penyumbang inflasi di Provinsi D.I. Yogyakarta dapat dilihat pada Gambar 7.



Sumber : Bank Indonesia (2015)

**Gambar 7. Komponen Penyumbang Inflasi di Provinsi D.I. Yogyakarta**

## B. Kebijakan Pengendalian Inflasi di DIY

Pada prinsipnya pengendalian inflasi di Provinsi DIY memiliki pedoman baku yang telah ditetapkan oleh Gubernur yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur DIY No.16 Tentang Pendoman Pengendalian Inflasi Daerah. Dalam Peraturan Gubernur tersebut ditegaskan bahwa pemerintah daerah wajib mendukung Pemerintah Pusat dalam pencapaian sasaran inflasi nasional dengan melakukan langkah-langkah pengendalian laju inflasi daerah. Untuk itu Gubernur berwenang menetapkan kebijakan pengendalian inflasi daerah dengan dibantu oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). TPID dibagi menjadi 2 bagian yaitu Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim Pengarah terdiri dari Ketua I yang dikepalai oleh Gubernur DIY, Ketua II adalah Sekertaris Daerah DIY, Ketua III Pemimpin Bank Indonesia DIY

---

18 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. (2015). Kunjungan Setjen DPR RI dalam Rangka Penelitian Strategi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah Pasca Kebijakan Baru Subsidi BBM. Yogyakarta: Bank Indonesia.

sedangkan Anggotanya terdiri dari Kepala Kepolisian DIY, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY<sup>19</sup>.

Sedangkan Tim Pelaksanan terdiri dari Ketua I adalah Ketua Tim Ekonomi Moneter Bank Indonesia DIY, Ketua II adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan UKM DIY, Ketua III adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY, Sekertaris Ketua Kelompok Kajian Ekonomi Bank Indonesia DIY. Sedangkan anggotanya terdiri dari Kepala Dinas Pertanian DIY, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika DIY, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Direktur Direktorat Reskrim Polda DIY, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota DIY, Kepala Perusahaan Listrik Negara, Kepala Bulog Divre DIY, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kepala Pertamina UPDN IV DIY, Kepala Biro Administrasi dan SDA Setda DIY, Kepala Cabang PT. Pupuk Sriwidjaja DIY, Kepala Petrokimia DIY dan Direktur PG Madu Baru<sup>20</sup>.

Dalam kondisi normal, peningkatan inflasi di DIY sangat terkait dengan peningkatan permintaan atau inflasi yang disebabkan oleh demand pull inflation. Pada bulan Januari, terjadi peningkatan inflasi yang didorong oleh peningkatan permintaan bahan pangan, sedangkan bulan Juli (Lebaran), laju inflasi yang terjadi dipicu oleh peningkatan bahan makanan, makanan jadi, dan transportasi. Pada bulan Juli dan Agustus yang merupakan masa orang tua mencari tempat kost atau pemondokan atau sewa atau beli rumah untuk tempat tinggal anak yang akan bersekolah di Yogyakarta, laju inflasi disumbang oleh peningkatan harga perumahan, sedangkan bulan Agustus – September, laju inflasi didorong oleh kenaikan harga sandang. Peningkatan harga

---

19 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 16 tahun 2011 Tentang Pedoman Inflasi Daerah.

20 *Ibid.*

sandang tersebut berkaitan dengan kebutuhan seragam baru atau baju baru menjelang tahun ajaran baru. Peningkatan inflasi (dalam kondisi normal) tersebut relatif dapat diantisipasi karena fenomena tersebut berulang.

Pada kondisi tidak normal atau terjadi shock seperti peningkatan harga BBM, laju inflasi meningkat lebih tinggi sebagaimana ditunjukkan oleh dampak inflasi yang disebabkan oleh kebijakan menaikkan BBM pada tanggal 22 Juni 2013. Pada kebijakan peningkatan harga BBM bulan Juni 2013, indeks harga konsumen di DIY mengalami peningkatan dari 139,72 (Juni 2013) menjadi 143,33 (Juli 2013). Pada periode yang sama (setahun sebelumnya), indeks harga konsumen di DIY meningkat dari 132,23 (Juni 2012) menjadi 133,24 (Juli 2012). Namun peningkatan laju inflasi tersebut menurunkan kembali pada bulan berikutnya.

Menurut BPS Provinsi DIY, terhitung sejak tanggal 18 November 2014, pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Kenaikan harga BBM mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung terhadap inflasi. Pengaruh tidak langsungnya, dengan kenaikan harga BBM secara otomatis akan menambah biaya distribusi barang/jasa tersebut dari produsen sampai kepada konsumen. Hal ini berdampak terhadap harga barang/ jasa di level konsumen menjadi naik. Sedangkan dampak langsung dari kenaikan harga BBM tersebut adalah naiknya indeks kelompok pengeluaran terutama yang berasal dari kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar naik menjadi 1,17 persen<sup>21</sup>.

Dari beberapa bahan pokok di Yogyakarta, tidak semua dapat dipenuhi oleh produksi yang berasal dari Yogyakarta. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan pokok provinsi DIY, menurut hasil wawancara dengan Disperindag Provinsi DIY banyak kebutuhan pokok yang harus diimpor dari daerah lain. Sebagai contoh, untuk

---

21 Badan Pusat Statistik. *Berita Resmi Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta No. 67/12/34/Th.XVI 1 Desember 2014*. Yogyakarta.

memenuhi kebutuhan akan gula, cabe, beras untuk provinsi DIY dipenuhi dari daerah sekitar seperti Provinsi Jawa Tengah maupun Jawa Timur<sup>22</sup>. Sehingga dampak dari kebijakan baru BBM, dimana harga BBM subsidi terus mengalami perubahan secara rutin sesuai kenaikan harga minyak internasional memberikan dampak secara tidak langsung terhadap harga-harga kebutuhan di Provinsi DIY. Biaya transportasi yang naik akibat kenaikan harga BBM memberikan dampak kepada naiknya harga komoditas yang harus diimpor dari daerah lain di sekitar Provinsi DIY.

Untuk itu langkah pengendalian inflasi di Provinsi DIY dilakukan melalui koordinasi antar instansi terkait melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara kontinu. Dalam tataran teknis, koordinasi antara Pemerintah Daerah. Langkah pengendalian inflasi di Provinsi DIY dilakukan tahap pertama dengan pemantauan harga yang setiap hari dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DIY di beberapa pasar yang ada di Provinsi DIY. Hasil pemantauan harga terhadap barang-barang yang dilakukan di beberapa pasar tersebut, akan dilaporkan setiap hari ke Kementerian Perdagangan di Jakarta sebelum jam 11 siang. Pada saat yang bersamaan laporan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi DIY tersebut juga digunakan sebagai bahan rapat bulanan Tim TPID Provinsi DIY. Akan tetapi jika terjadi *shock* harga suatu barang yang terjadi di pasar secara mendadak, Disperindag akan melaporkan situasi tersebut kepada pihak terkait, terutama kepada Gubernur Provinsi DIY. Hal ini diperlukan untuk mengendalikan situasi dan harga barang-barang tersebut agar tidak terjadi inflasi yang tinggi di Provinsi DIY<sup>23</sup>.

Pada saat yang bersamaan, BPS Provinsi DIY juga melakukan pemantauan harga secara periodik terhadap tiga pasar yang

---

22 Hasil Wawancara dengan EKo, Kepala Bagian Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Provinsi DIY tanggal 24 Maret 2015.

23 *Ibid.*

ada di Provinsi DIY sebagai *benchmark* penghitungan inflasi di DIY. Laporan dari BPS Provinsi DIY juga digunakan dalam rapat bulanan tim TPID Provinsi DIY<sup>24</sup>. Sehingga kombinasi data yang dikumpulkan dari Disperindag dan BPS Provinsi digunakan sebagai data-data yang valid bagi tim TPID untuk mengambil keputusan dalam rapat. Hasil keputusan dalam rapat TPID Provinsi, Pemerintah Daerah bersama dengan Bank Indonesia Provinsi DIY mengadakan *pers conference* untuk menenangkan masyarakat jika terjadi *shock* harga barang dalam perekonomian di Provinsi DIY<sup>25</sup>. Kemudian dalam rapat bulanan TPID Provinsi DIY, seluruh SKPD yang terkait dengan inflasi beserta BI melakukan review bulanan terhadap perkembangan harga-harga di Provinsi DIY.

TPID yang telah dibentuk di Provinsi DIY memiliki fokus kepada empat K, K tersebut adalah sebagai berikut pada Tabel 1:

**Tabel 1. Fokus TPID DIY dalam Mengendalikan Inflasi**

<p><b>Kecukupan Produksi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program pemberian insentif kepada sapi betina yang melahirkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).</li> <li>• Pengembangan klaster pangan: Beras menor, cabe, ikan tawar, gula semut.</li> </ul>	<p><b>Kelancaran Distribusi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembaga distribusi pangan masyarakat</li> <li>• Lembaga akses pangan masyarakat</li> <li>• Program beras daerah antara Bulog dengan Pemerintah Daerah</li> <li>• Pasar tani untuk memotong jalur distribusi</li> </ul>
<p><b>Keterjangkauan Harga:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoring rutin oleh high level TPID ke pasar tradisional</li> <li>• Pengembangan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis DIY</li> <li>• Pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar bebas.</li> <li>• Pasar lelang cabai merah di Kabupaten Kulon Progo.</li> </ul>	<p><b>Komunikasi Ekspektasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi di Media massa mealui media cetak dan elektronik</li> <li>• Iklan layanan masyarakat untuk berbelanja bijak oleh Gubernur DIY.</li> <li>• Upaya persuasi kepada Asosiasi Usaha untuk menjual dengan harga wajar.</li> </ul>

Sumber: Bank Indonesia DIY (2015)

24 Hasil Wawancara dengan J. Bambang Kristianto, MA, Kepala BPS, Provinsi DIY tanggal 26 Maret 2015.

25 Hasil Wawancara dengan Sugeng Purwanto, Bappeda, Provinsi DIY tanggal 24 Maret 2015.

Dengan mempertimbangkan pengembangan TPID ke depan, maka penyusunan program kerja TPID selain program kerja 4 K terdapat beberapa elemen tambahan dalam kaitannya dengan Penguatan Kelembagaan. Sehingga program kerja TPID 2015 menjadi 5 P (Panca Pamungkas), dengan penjelasan pada Tabel 2 sebagai berikut :

**Tabel 2. Mekanisme Pelaksanaan Program Kerja 5 P**

No.	Upaya Pengendalian	Mekanisme Pelaksanaan
1	Pemantauan harga dan produksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Melaksanakan Rapat Koordinasi TPID di tingkat teknis.</li> <li>✓ Menyusun format standar pemantauan harga.</li> <li>✓ Melakukan peninjauan</li> </ul>
2	Pengendalian harga	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Melaksanakan Rapat Koordinasi di tingkat high level</li> <li>✓ Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait melakukan intervensi sesuai tupoksinya dan berdasarkan rekomendasi TPID.</li> <li>✓ Menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 3 Tahun 2015 tentang Harga Eceran Tertinggi epiji tabung tiga kilo.</li> </ul>
3	Penguatan dari sisi Supply	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Memonitoring pelaksanaan dan solusi permasalahan untuk penguatan LDPM dan pemberdayaan lumbung pangan masyarakat.</li> <li>✓ Memonitoring pelaksanaan bantuan sertifikasi tanah untuk lahan pertanian dalam rangka peningkatan produksi pangan.</li> <li>✓ Melakukan sinergi dengan insntansi terkait dalam rangka pengembangan klaster untuk mendukung ketahanan pangan seperti padi, sapi, dll.</li> <li>✓ Melaksanakan koordinasi dengan Dinas Pertanian untuk penguatan infrastruktur dan saranan pertanian antara lain irigasi dan alat-alat pertanian.</li> <li>✓ Melaksanakan/menerima kunjungan kerja dan temu pengusaha petani dalam rangka kerjasama TPID antar daerah.</li> </ul>
4	Peningkatan efektivitas diseminasi informasi dan pengendalian ekspektasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Menyelenggarakan forum diskusi untuk meningkatkan pemahaman wartawan tentang inflasi.</li> <li>✓ Membuat iklan layanan masyarakat mengenai belanja bijak menjelang lebaran dan akhir tahun berupa : (a)himbauan Gubernur DIY melalui media elektronik dan cetak; dan (b) himbauan kepada pedagang kuliner unggulan melalui surat yang ditandatangani oleh Gubernur DIY.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Diseminasi layanan sms gateway kepada masyarakat dan stakeholder lainnya melalui Pusat Informasi Harga dan Pangan Strategis (PIHPS).</li> <li>✓ Membuka Pos Pengaduan Masyarakat (kotak saran).</li> </ul>
5	Penguatan TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Menyelenggarakan Rapat Koordinasi tentang TPID Kabupaten/ Kota dalam rangka penyalarsan program kerja.</li> <li>✓ Menyusun mekanisme kerjasama antar TPID Provinsi dan Kabupaten/ Kota.</li> <li>✓ Melaksanakan kunjungan kerja/studi banding ke TPID daerah lain dalam rangka capacity building.</li> </ul>

Sumber: Bank Indonesia DIY (2015)

Inti langkah strategis pengendalian inflasi daerah Provinsi D.I. Yogyakarta berfokus kepada 5 P seperti yang telah diuraikan diatas. Setelah program TPID tersebut berjalan dan terbukti bahwa langkah strategis dari TPID Provinsi D.I. Yogyakarta dapat mengendalikan inflasi daerah. Hal ini terbukti dari tingkat inflasi Provinsi D.I. Yogyakarta pada periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 selalu berada dibawah level inflasi nasional. Bahkan pada saat terjadi kenaikan harga BBM dan kenaikan tarif listrik pun, tingkat inflasi di Provinsi D.I. Yogyakarta masih dapat terkendali dan berada di bawah inflasi nasional. Sehingga tidak salah bahwa pemerintah D.I. Yogyakarta menjadi patokan dan contoh Provinsi yang berhasil menendalikan inflasi daerahnya.

#### **IV. FORECASTING JANGKA PENDEK INFLASI DI PROVINSI DIY**

Pada bagian ini dilakukan forecasting atau peramalan terhadap inflasi yang terjadi di D.I. Yogyakarta. Pada prinsipnya peramalan dapat diklasifikasikan menjadi dua metode kualitatif dan metode kuantitatif. Namun pada proses peramalan kali ini digunakan metode peramalan kuantitatif. Metode peramalan kuantitatif melibatkan analisis statistik terhadap data-data yang sudah lalu. Metode peramalan kuantitatif terbagi atas dua golongan, yaitu model deret waktu satu ragam dan model kausal.

Fokus utama melakukan peramalan dengan menggunakan model deret waktu satu ragam. Model deret waktu satu ragam

fokus kepada observasi terhadap urutan pola data secara kronologis suatu peubah tertentu. Dalam hal ini metode yang digunakan yakni dengan menggunakan model ARIMA. Salah satu pendekatan yang umum digunakan adalah conditional least square. Prinsip dasar pendekatan ini adalah meminimumkan jumlah kuadrat error yang bersifat *white noise*<sup>26</sup>.

Model ARIMA pada prinsip menggunakan pendekatan format model *Box Jenkins*. Model ARIMA sendiri merupakan gabungan model gabungan model AR(p) dan MA(q)<sup>27</sup>. ARIMA sangat bermanfaat untuk peramalan jangka pendek. Untuk itu pada penelitian ini menggunakan peramalan dengan menggunakan model ekonometri ARIMA.

Menurut Gujarati (2012), ada empat langkah yang harus dilakukan untuk dapat melakukan peramalan dengan menggunakan metode ARIMA. Empat langkah berikut adalah sebagai berikut : (1) langkah identifikasi, yaitu menemukan nilai yang sesuai untuk p, d dan q. Langkah ini dapat ditunjukkan dengan hasil correlogram; (2) estimasi, sesudah mengidentifikasi nilai yang sesuai pada p dan q, langkah selanjutnya adalah mengestimasi parameter dari autoregresinya dan rata-rata bergerak yang termasuk dalam modelnya; (3) pemeriksaan diagnostik, setelah memilih model ARIMA tertentu dan mengestimasi parameternya, selanjutnya diperiksa apakah model yang dipilih cocok dengan datanya karena ada kemungkinan bahwa model ARIMA dapat melakukan tugasnya dengan benar; (4) peramalan, salah satu alasan terkenalnya model ARIMA adalah keberhasilannya dalam peralaman. Banyak kasus membuktikan bahwa peramalan yang

---

26 M. Firdaus. (2012) *Aplikasi Ekonometrika Untuk data Panel dan Time Series*. Bogor : IPB Press. Hal. 46-47.

27 Mahyus Ekananda. (2014). *Analisis Data Time Series*. Jakarta: Mitra Wacana Media. Hlm.63-65.

diperoleh dai metode ini lebih andal dari model ekonometri tradisional tertentu dalam peramalan jangka pendek<sup>28</sup>.

Data yang digunakan untuk melakukan peramalan terhadap inflasi di Provinsi D.I. Yogyakarta bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta. Data inflasi bulanan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 bulan Mei. Kemudian dari data yang ada dilakukan peramalan terhadap inflasi yang terjadi pada periode yang akan datang dengan menggunakan teknik ekonometri ARIMA. Kemudian data yang diperoleh dari BPS akan diolah menggunakan software Minitab versi 16.

Kemajuan bidang komputasi telah memudahkan prosedur untuk mengestimasi parameter model ARIMA diatas. Dalam tahap estimasi model, penentuan ordo p dan q secara lebih terperinci dapat dilakukan dengan identifikasi *autocorrelation function* (ACF) dan partial *autocorrelation function* (PACF). Dari model ARIMA tentatif yang diperoleh selanjutnya dilakukan uji diagnostik. Untuk memutuskan model mana yang dipilih dari beberapa model yang fit, dapat digunakan kriteria *Akaike Information Criteria* (AIC) atau *Schwartz Bayesian Criterion* (SBC). Model dengan AIC dan SBC yang terkecil yang dipilih<sup>29</sup>.

#### **A. Estimasi Model**

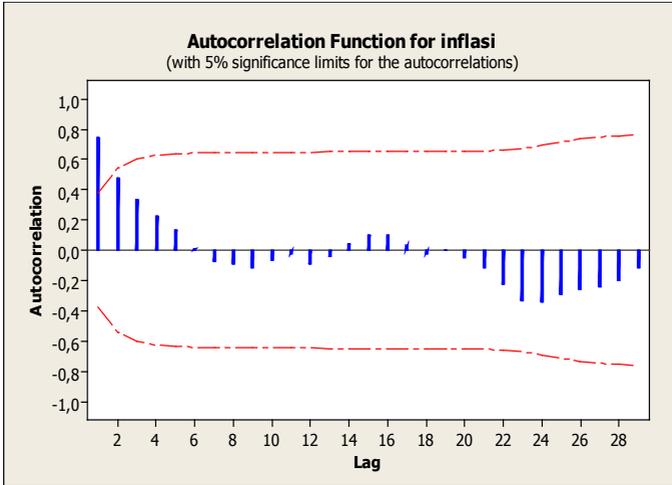
Dari pengamatan terhadap perilaku ACF dan PACF maka dapat diambil beberapa kesimpulan. Pada Gambar 8a. terlihat bahwa ACF untuk data inflasi di Provinsi D.I. Yogyakarta bersifat *dying down*, yang menunjukkan bahwa data pada tingkat level tidak stasioner. Sedangkan korelogram untuk data pada tingkat *difference* atau pada tingkat pembeda pertama menunjukkan bahwa ACG bersifat *cut off* (lihat Gambar 8b). Ini berarti data inflasi

---

28 Damondar N. Gujarati dan Dawn C. Porter. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Edisi 5 Buku 2. Penerjemah Raden Carlos Mangunsong. Jakarta : Penerbit Salemba Empat. Hal. 477-478.

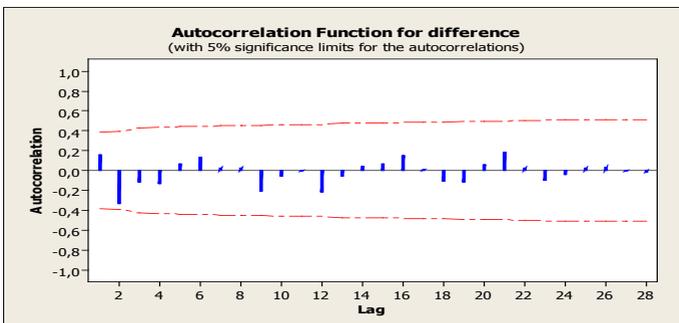
29 Firdaus, *Ibids*. Hal. 47.

pada tingkat difference sudah stasioner pada tingkat perbedaan pertama. PCAF untuk data perbedaan pertama terlihat pada Gambar 8c. PCAF dalam hal ini terlihat menunjukkan pola *damped sine wave*.



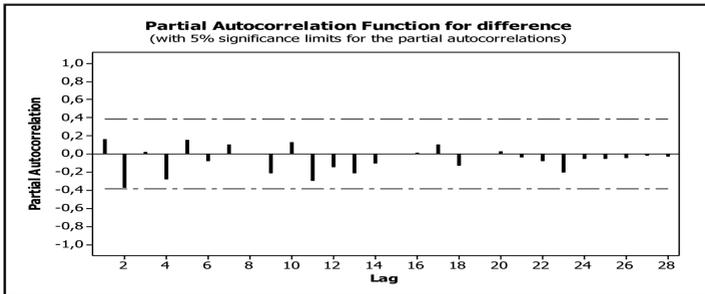
Sumber : Hasil Pengolahan Data menggunakan Minitab 16 (2016).

**Gambar 8 a. Autocorrelation for Inflation**



Sumber : Hasil Pengolahan Data menggunakan Minitab 16 (2016).

**Gambar 8 b. Autocorrelation for Difference of Inflation**



Sumber : Hasil Pengolahan Data menggunakan Minitab 16 (2016).

**Gambar 8 c. Partial Autocorrelation for Difference of Inflation**

Berdasarkan kesimpulan diatas, model tentatif ARIMA yang diperoleh adalah *Moving Average (MA)* murni. Estimasi awal dapat dimulai dengan ARIMA (0,1,1). Hasil estimasi model dapat dilihat pada Tabel 3. dibawah. Selanjutnya uji diagnostik akan membantu identifikasi model ini lebih lanjut.

**Tabel 3. Model ARIMA untuk Infalsi**

```

Estimates at each iteration
Iteration   SSE      Parameters
           0 13,0367    0,100 -0,065
           1 12,0914   -0,050 -0,140
           2 11,6468   -0,188 -0,160
           3 11,4051   -0,295 -0,165
           4 11,2788   -0,371 -0,166
           5 11,2141   -0,425 -0,167
           6 11,1823   -0,461 -0,167
           7 11,1676   -0,486 -0,166
           8 11,1614   -0,502 -0,166
           9 11,1589   -0,512 -0,166
          10 11,1580   -0,518 -0,166
          11 11,1576   -0,521 -0,166
          12 11,1575   -0,524 -0,166
          13 11,1575   -0,525 -0,166
          14 11,1574   -0,526 -0,166
          15 11,1574   -0,526 -0,166

Relative change in each estimate less than 0,0010

Final Estimates of Parameters

Type      Coef   SE Coef   T      P
MA 1      0,5261  0,1636   -3,22  0,003
Constant  0,1661  0,1814   -0,92  0,368

Differencing: 1 regular difference
Number of observations: Original series 30, after differencing 29
Residuals:    SS = 11,1410 (backforecasts excluded)
              MS = 0,4126  DF = 27

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic
Lag        12      24      36      48
Chi-Square 12,8   18,7   *      *
DF         10      22     *      *
P-Value    0,235  0,662  *      *
    
```

Sumber : Hasil Pengolahan Data Menggunakan Minitab 16 (2016).

## B. Uji Diagnostik untuk Evaluasi Model

Langkah selanjutnya setelah dilakukan estimasi model adalah perlu dilakukannya evaluasi untuk memastikan apakah model yang diestimasi merupakan model yang terbaik atau belum. Menurut Firdaus (2015) terdapat 6 kriteria dalam evaluasi model Box-Jenkins yaitu:

1. Residual atau *error* peralaman bersifat random. Untuk memastikan apakah model sudah memenuhi syarat ini, dapat digunakan indikator *Box-Ljung Statistic*. Dari hasil estimasi di Tabel 4 diketahui bahwa nilai *p-value* untuk uji statistik ini lebih besar dari tingkat signifikansi 5% yang menunjukkan bahwa residual sudah *random*.
2. Model parsimonious. Dengan model yang diperoleh yang dapat ditulis sebagai ARIMA (0,1,1) menunjukkan bahwa model relatif sudah dalam bentuk paling sederhana.
3. Parameter yang diestimasi signifikan dengan beda nyata nol. Ini dapat dilihat dari nilai *p-value* koefisien yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 5%. Terlihat pada output hasil estimasi bahwa nilai *p-value* koefisien MA adalah sebesar 0,003.
4. Kondisi invertibilitas ataupun stasioneritas harus terpenuhi. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah koefisien MA atau AR dimana masing-masing jumlahnya harus kurang dari 1. Dalam output hasil estimasi diatas terlihat jumlah koefisien MA adalah sebesar 0,5261; dalam persamaan tidak mengandung koefisien AR. Hal ini berarti kondisi invertibilitas terpenuhi.
5. Proses iterasi harus konvergen. Bila ini terpenuhi maka pada session terdapat pernyataan *relative change in each estimate less than 0,0010*. Pada hasil estimasi output diatas ini dipenuhi oleh model.

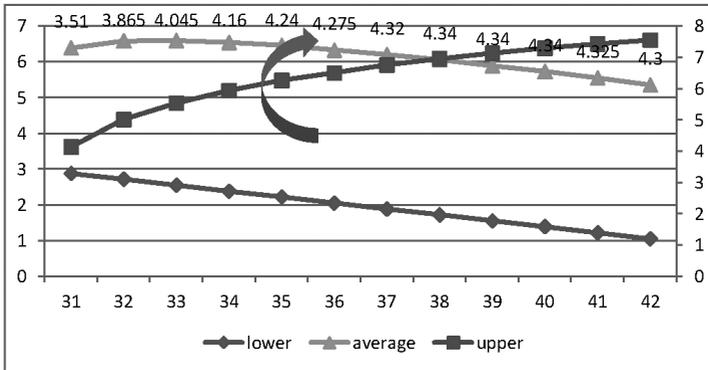
6. Model harus memiliki MSE yang kecil. Pada model di atas nilai MS adalah sebesar 0,4126. Dan nilai ini jauh lebih kecil bila dilakukan estimasi dengan model alternatif lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwa model ARIMA yang digunakan adalah peramalan terbaik dengan menggunakan prosedur *Box-Jenkins*.

### C. *Forecasting* Inflasi

Berdasarkan hasil evaluasi model di atas, maka tahap selanjutnya adalah melakukan peramalan terhadap inflasi untuk beberapa tahun ke depan. Hasil output peramalan dari ARIMA dapat dilihat pada Gambar 9. nilai peramalan inflasi Provinsi D.I. Yogyakarta untuk beberapa periode ke depan dapat terlihat hasil estimasi. Hasil estimasi *forecasting* dari ARIMA maka diproyeksikan inflasi yang terjadi di Provinsi D.I. Yogyakarta pada akhir tahun 2016 berada pada periode ke-36. Dengan demikian inflasi yang akan terjadi pada Desember 2016 adalah sebesar 4,275%. Kondisi inflasi pada akhir tahun sebesar 4,275% akan dapat terjadi dengan catatan penting bahwa pemerintah pusat tidak melakukan perubahan terhadap *administered price* dan tidak terdapat lonjakan harga pada *volatile food* di Provinsi D.I. Yogyakarta. Hal ini dikarenakan berdasarkan penelitian Juuso dan Aaron (2009) mengatakan bahwa kenaikan *volatile food* seperti harga bahan pokok makanan dapat mempengaruhi inflasi secara langsung<sup>30</sup>.

---

30 Juuso Kaarevirta dan Aaron Mehrotra. (2009). Business Survey and Inflation Forecasting in China. *Economic Change and Restructuring*. Vol. 42 (4). Hlm.263-271



Sumber : Hasil pengolahan data dengan menggunakan Minitab 16 (2016).

**Gambar 9. Forecasting/ Peramalan Inflasi D.I. Yogyakarta untuk beberapa periode ke depan (dalam Persentase)**

Untuk mencapai tingkat inflasi yang diinginkan, maka Pemerintah Provinsi DIY perlu menggandeng otoritas moneter untuk menjaga inflasi. Penelitian yang dilakukan oleh Soderstrom (2002)<sup>31</sup> dan Maria et al. (2012)<sup>32</sup> mengemukakan bahwa inflasi yang terjadi harus diredam dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas moneter. Hasil penelitian Harun dan Ege (2015) menegaskan bahwa perubahan kebijakan moneter memiliki pengaruh terhadap peramalan inflasi di masa yang akan datang.<sup>33</sup> Sinergitas kebijakan dan kerjasama antara Pemerintah Provinsi DIY dengan Bank Indonesia selama ini telah terbukti dapat menjaga inflasi di Provinsi DIY pada level yang rendah dan stabil.

31 Soderstrom U. (2002). Monetary Policy with uncertain parameter. *Scand Journal Economic*. Vol.104. Hlm.125-145.

32 Mara, Geuglielmo Caporale, Luca Onorante dan Paolo Paesani. (2012). Inflation and inflation uncertainty in the euro Area. *Empirical Economic*. Vol 43. Hlm 597-615.

33 Harun Ozkan dan M. Ege Yazgan. (2015). Is forecasting inflation easier under inflation targeting? *Empirical Economic*. Vol.48. Hlm. 609-626.

## V. PENUTUP

Inflasi merupakan salah satu hal yang penting yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan perekonomian daerah. Salah satu Provinsi yang berhasil mengelola inflasinya dengan cukup baik adalah Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta. Pemerintah D.I. Yogyakarta dalam melakukan pengelolaan inflasi. Inflasi di Provinsi D.I. Yogyakarta lebih dari 50% berasal dari komponen *administered prices* dan *volatile food*. Pengelolaan inflasi di Provinsi D.I. Yogyakarta bertumpu kepada pemanfaatan dan pemberdayaan TPID Provinsi yang menjadi tombak utama pengelolaan inflasi.

Sedangkan hasil *forecasting*/peramalan inflasi di Provinsi D.I. Yogyakarta yang dilakukan dengan menggunakan metode ARIMA menghasilkan hasil yang sejalan dengan keadaan inflasi di DIY. Hasil peramalan akan inflasi di Provinsi D.I. Yogyakarta menunjukkan tren yang menurun. Dan diperkirakan inflasi Provinsi D.I. Yogyakarta pada akhir tahun 2016 berada pada level 4,27%. Kondisi ini jelas menunjukkan bahwa tren inflasi di Provinsi DIY akan menurun.

Namun untuk mencapai penurunan ini harus ada syarat mutlak yang harus dilakukan oleh Provinsi D.I. Yogyakarta. Syarat mutlak yang pertama adalah Provinsi D.I. Yogyakarta harus bekerja keras bersama *stakeholder* terkait dalam pengendalian inflasi untuk menjaga tingkat inflasi di provinsi berada pada level yang stabil dan rendah. Fungsi TPID yang selama ini berjalan baik di Provinsi D.I. Yogyakarta harus tetap dikondisikan dalam keadaan koordinasi yang baik dan harmonis. Syarat mutlak yang kedua adalah dalam periode sampai akhir tahun 2016 diharapkan bahwa pemerintah tidak melakukan perubahan terhadap *administered price* dan tidak terdapat lonjakan yang cukup tinggi terhadap *volatile food* di Provinsi D.I. Yogyakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Anthanasios Koulakiotis, Katerina Lyroudi dan Nicholas Papasyriopoulos. (2012). Inflation, GDP and Causality for European Countries. International Advance Economic Research. Vol.18. Hlm.53-62.
- Damondar N. Gujarati dan Dawn C. Porter. (2012). Dasar-Dasar Ekonometrika. Edisi 5 Buku 2. Penerjemah Raden Carlos Mangunsong. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Davis G, Kanago B. (1996). On measuring the effect of inflation uncertainty on real GNP Growth. Oxf Econ Papers. Vol.38. (1). Hlm. 163-175.
- Elder J. (2004). Another perceptive on the Effect of Inflation uncertainty. Journal Money and Credit Bank. Vol 36. Hlm.911-928.
- Gregory Mankiw, Euston Quah dan Peter Wilson. (2013). Pengantar Ekonomi Makro Principles of Economics. Jakarta: Salemba Empat.
- Gregory Mankiw. (2008). Makroekonomi Edisi Keenam. Jakarta : Erlangga.
- Grier KB, Perry MJ. (2000). The effect of real and nominal uncertainty on inflation and output growth: some grach-m evidence. Journal Applied Econometric. Vol.15. Hlm. 45-58.

- Harun Ozkan dan M. Ege Yazgan. (2015). Is forecasting inflation easier under inflation targeting? *Empirical Economic*. Vol.48. Hlm. 609-626.
- Holland SA. (1993). Comments on inflation regimes and the sources of inflation unvertainty. *J Money Credit Bank*. Vol.25. Hlm. 514-520.
- Juuso Kaarevirta dan Aaron Mehrotra. (2009). Business Survey and Inflation Forecasting in China. *Economic Change and Restructuring*. Vol. 42 (4). Hlm.263-271.
- Pohan Aulia. (2008). *Potret Kebijakan Moneter Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Robert Barro. (1995). Inflation and Growth. *Intereconomics*. Vol.30(6). Hlm. 301-304.
- Soderstrom U. (2002). Monetary Policiy with unvertain parameter. *Scand Journal Economic*. Vol.104. Hlm.125-145.
- Mahyus Ekananda. (2014). *Analisis Data Time Series*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mara, Geuglielmo Caporale, Luca Onorante dan Paolo Paesani. (2012). Inflation and inflation uncertainty in the euro Area. *Empirical Economic*. Vol 43. Hlm 597-615.
- M. Firdaus. (2012). *Aplikasi Ekonometrika Untuk data Panel dan Time Series*. Bogor : IPB Press.

**Artikel, Majalah, Makalah, Skripsi atau Tesis dan Website :**

- CNN Indonesia, US\$ 1 Setera 35 Ribu Triliun, Zimbabwe, Hapus Mata Uangnya, (online) (<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20150613160851-78-59821/us--1-setera-35-ribu-triliun-zimbabwe-hapus-mata-uangnya>). Diakses 18 Januari 2016).

“Pengendalian Inflasi DIY Terbaik Nasional”, diunduh dari <http://www.jogja.co/pengendalian-inflasi-diy-terbaik-nasional/>, tanggal 11 Juli 2016.

“Pengenalan Inflasi”, diunduh dari <http://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/pengenalan/Contents/Default.aspx>, tanggal 12 Juli 2016.

Nita Ariastuti. (2011). Studi Pengaruh Perubahan Nilai Tukar Rupiah Per Dolar AS Terhadap Inflasi Selama Periode Inflation Targeting di Indonesia. Tesis. Fakultas Ekonomi. Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik. Universitas Indonesia,

“Pengenalan Inflasi”, diunduh dari <http://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/pengenalan/Contents/Default.aspx>, tanggal 12 Juli 2016.

#### **Dokumen Negara :**

Badan Pusat Statistik. Berita Resmi Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta No. 67/12/34/Th.XVI 1 Desember 2014. Yogyakarta

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. (2015). Kunjungan Setjen DPR RI dalam Rangka Penelitian Strategi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah Pasca Kebijakan Baru Subsidi BBM. Yogyakarta : Bank Indonesia.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 16 tahun 2011 Tentang Pedoman Inflasi Daerah.



## EPILOG

Inflasi di daerah merupakan salah satu hal yang penting yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan perekonomian daerah. Hasil studi ini menemukan bahwa pengendalian inflasi di Provinsi D.I. Yogyakarta menggunakan pedoman baku yang telah ditetapkan oleh Gubernur. Pedoman baku tersebut dituangkan dalam Peraturan Gubernur DIY No.16 Tentang Pendoman Pengendalian Inflasi Daerah. Dalam Peraturan Gubernur tersebut ditegaskan bahwa pemerintah daerah wajib mendukung Pemerintah Pusat dalam pencapaian sasaran inflasi nasional dengan melakukan langkah-langkah pengendalian laju inflasi daerah.

Untuk itu Gubernur berwenang menetapkan kebijakan pengendalian inflasi daerah dengan dibantu oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). TPID dibagi menjadi 2 bagian yaitu Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim Pengarah terdiri dari Ketua I yang dikepalai oleh Gubernur DIY, Ketua II adalah Sekertaris Daerah DIY, Ketua III Pemimpin Bank Indonesia DIY sedangkan Anggotanya terdiri dari Kepala Kepolisian DIY, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda DIY dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY.

Sedangkan Tim Pelaksanaan terdiri dari Ketua I adalah Ketua Tim Ekonomi Moneter Bank Indonesia DIY, Ketua II adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan UKM DIY, Ketua III adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY, Sekertaris Ketua Kelompok Kajian Ekonomi Bank Indonesia DIY. Sedangkan anggotanya terdiri dari Kepala Dinas Pertanian DIY,

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika DIY, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Direktur Direktorat Reskrim Polda DIY, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian Kota DIY, Kepala Perusahaan Listrik Negara, Kepala Bulog Divre DIY, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kepala Pertamina UPDN IV DIY, Kepala Biro Administrasi dan SDA Setda DIY, Kepala Cabang PT. Pupuk Sriwidjaja DIY, Kepala Petrokimia DIY dan Direktur PG Madu Baru.

Inti langkah strategis pengendalian inflasi daerah Provinsi D.I. Yogyakarta berfokus kepada 5 P (Pemantauan harga dan produktivitas, Pengendalian harga, Penguatan dari sisi supply, Peningkatan efektivitas diseminasi informasi dan pengendalian ekspektasi dan Penguatan TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota). Setelah program TPID tersebut berjalan dan terbukti bahwa langkah strategis dari TPID Provinsi D.I. Yogyakarta dapat mengendalikan inflasi daerah. Hal ini terbukti dari tingkat inflasi Provinsi D.I. Yogyakarta pada periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 selalu berada dibawah level inflasi nasional. Bahkan pada saat terjadi kenaikan harga BBM dan kenaikan tarif listrik pun, tingkat inflasi di Provinsi D.I. Yogyakarta masih dapat terkendali dan berada di bawah inflasi nasional. Sehingga tidak salah bahwa pemerintah D.I. Yogyakarta menjadi patokan dan contoh Provinsi yang berhasil menendalikan inflasi daerahnya.

Hasil estimasi *forecasting menggunakan* ARIMA diproyeksikan inflasi yang terjadi di Provinsi D.I. Yogyakarta pada akhir tahun 2016 berada pada periode ke-36. Dengan demikian inflasi yang akan terjadi pada Desember 2016 adalah sebesar 4,275%. Kondisi inflasi pada akhir tahun sebesar 4,275% akan dapat terjadi dengan catatan penting bahwa pemerintah pusat tidak melakukan perubahan terhadap *administered price* dan tidak terdapat lonjakan harga pada *volatile food* di Provinsi D.I. Yogyakarta.

Dal konteks Kebijakan stabilisasi harga saat ini untuk beberapa komoditas selain beras masih bersifat reaktif, adhoc dan jangka pendek. Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan yang bersifat transformatif dari hulu sampai hilir. Terkait kelembagaan regulator, terdapat beberapa alternatif bentuk kelembagaan regulator pangan yang dapat memperkuat stabilisasi harga pangan. Berdasarkan kajian terhadap beberapa aspek (antara lain kesesuaian dengan UU, kewenangan, koordinasi dan fokus pelaksanaan tugas), bentuk kelembagaan regulator pangan yang dipandang paling sesuai adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) baik yang bersifat mandiri atau melekat dengan Kementerian.

Opsi yang terakhir memiliki kelebihan dalam hal koordinasi dan keikutsertaan dalam sidang kabinet. Untuk kelembagaan operator, UU Pangan pasal 127 dan 128 menegaskan penugasan pada Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) di bidang pangan dengan cakupan dari tahap produksi sampai dengan distribusi. BUMN yang selama ini ditugaskan untuk melakukan fungsi stabilisasi harga pangan adalah BULOG dan hasil evaluasi atas kinerja BULOG dalam stabilisasi harga pangan (beras) sejauh ini menunjukkan kinerja yang baik. Dengan mempertimbangkan jaringan BULOG di seluruh Indonesia dan kapasitas fisik pergudangannya yang cukup memadai, maka jenis komoditas yang dapat dikelola oleh BULOG adalah sejenis biji-bijian (*grains*) dan gula pasir. Oleh karena itu, Pemerintah diusulkan untuk menugaskan BULOG melakukan stabilisasi harga beras, gula pasir dan kedelai. Dalam pelaksanaan tugasnya, jika anggaran pemerintah terbatas untuk membiayai pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang dikelola oleh BULOG, maka perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan fungsi komersial BULOG sehingga BULOG dapat memiliki stok dalam jumlah yang cukup dan dapat digunakan untuk melakukan fungsi stabilisasi.

Upaya mendukung fungsi komersial BULOG tersebut antara lain dapat dilakukan dengan memberikan pengutamaan untuk melakukan impor komoditas beras, gula dan kedelai. Terkait dengan jenis komoditas yang perlu dijaga stabilitas harganya, dilakukan evaluasi terhadap kebijakan stabilisasi harga pangan dengan melihat efektivitas pengendalian harga pada komoditas pangan strategis yang ada saat ini. Berdasarkan kajian, jenis komoditas prioritas utama yang perlu dijaga stabilitas harganya adalah beras, gula, kedelai, daging sapi, bawang merah, dan cabai merah. Penentuan jenis komoditas tersebut mempertimbangkan aspek ekonomi (bobot dalam pengeluaran rumah tangga, jumlah petani dan kemiskinan, dampak inflasi), aspek sosial politik, dan keterkaitan dengan program Pemerintah seperti rencana Aksi Bukit Tinggi untuk ketahanan pangan yang dicanangkan pada tanggal 29 Oktober 2013.

Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pengendalian harga pada masing-masing komoditas pangan tersebut sebagai berikut: (a) Untuk komoditas beras, gula dan kedelai diperlukan penambahan alokasi anggaran untuk menambah Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dan kebijakan pengaturan impor yang berorientasi pada stabilisasi harga; (b) Untuk komoditas daging sapi, bawang merah dan cabai merah, kebijakan harga referensi perlu dilanjutkan dan dalam jangka pendek perlu menyesuaikan harga referensi daging sapi menjadi Rp85.000/kg dari yang berlaku saat ini sebesar Rp76.000/Kg. Selain itu, juga diperlukan evaluasi terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang membatasi distribusi ternak antar daerah dan mendorong integrasi antara petani produsen cabai merah dan bawang merah dengan industri pengolahan.

Desentralisasi fiskal diharapkan dapat menjadi instrumen kebijakan yang efektif untuk membantu perkembangan pertumbuhan ekonomi terutama perekonomian daerah. Melalui desentralisasi, setiap provinsi mengetahui secara jelas faktor-

faktor yang menyebabkan terjadinya instabilitas makroekonomi di daerahnya seperti naiknya inflasi. Selain itu, setiap provinsi juga mempunyai wewenang fiskal yang besar dalam mengendalikan dan mempertahankan stabilitas inflasi di daerahnya. Oleh karena itu, melalui desentralisasi setiap provinsi mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya inflasi dan menggunakan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan terkait inflasi.

Melalui dana-dana yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah daerah dapat melakukan kegiatan pengendalian inflasi. Di dalam APBD tersebut, selain pendapatan asli daerah (PAD), dana untuk kegiatan pengendalian inflasi dapat juga berasal dari dana perimbangan (dana dari desentralisasi fiskal). Diharapkan dana-dana tersebut dapat berfungsi secara efektif dalam menstabilkan tingkat inflasi terutama dana perimbangan.

Desentralisasi fiskal yang tinggi terjadi pada dana DAU dalam belanja daerah. Temuan ini mengimplikasikan bahwa pemerintah daerah mempunyai otoritas yang besar dalam menggunakan seluruh kekayaan dan sumber daya di daerahnya dalam bentuk pengeluaran/belanja daerah. Besarnya kontribusi pengeluaran pemerintah daerah berpotensi menyebabkan instabilitas makroekonomi seperti inflasi di daerah khususnya pengeluaran yang dilakukan untuk program dan aktivitas yang tidak produktif. Karena, alokasi sumber daya untuk pengeluaran/belanja pemerintah daerah menjadi tidak efisien. Hal ini menjelaskan bahwa hubungan antara desentralisasi pengeluaran dan stabilitas makroekonomi berkorelasi secara positif. Hal inilah yang menyebabkan perkembangan tingkat inflasi di Provinsi DI Yogyakarta akhir-akhir ini cukup terkendali dimana akhir-akhir ini porsi dana DAU dalam belanja daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota di Provinsi DI Yogyakarta mengalami penurunan.

Provinsi Papua Barat juga memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap dana-dana dari pemerintah pusat. Pada

tahun 2013, sumber penerimaan Provinsi Papua Barat hampir 53,08 persen berasal dari dana perimbangan. Akan tetapi, persentase tersebut mengalami penurunan pada tahun 2014 yakni menjadi 48,31 persen. Dana perimbangan tersebut, tahun 2013 sebesar 62,25 persen berasal dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sedangkan DAU hanya sebesar 35,58 persen. Tahun 2014 mengalami perubahan, sumbangan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak terhadap dana perimbangan sebesar 57,48 persen sedangkan DAU sebesar 40,32 persen. Walaupun mengalami penurunan, sama seperti Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Papua Barat dapat dikatakan masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap dana-dana dari pemerintah pusat.

Masih tingginya tingkat inflasi di Provinsi Papua Barat, khususnya 2013 dan 2014, sejalan naiknya belanja daerah Provinsi Papua Barat. Realisasi belanja daerah Provinsi Papua Barat pada tahun 2014 mengalami peningkatan, yakni Rp 4,5 triliun pada tahun 2013 menjadi Rp 5,4 triliun pada tahun 2014 atau mengalami kenaikan sebesar 20,31 persen. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Peran pemerintah daerah sangat penting dalam menjaga stabilitas harga mengingat karakteristik inflasi di Indonesia yang masih dipengaruhi oleh gejolak di sisi pasokan (*supply side shocks*). Terjaganya inflasi daerah pada tingkat yang rendah dan stabil akan mendukung upaya pencapaian sasaran inflasi nasional. Hal ini didasari kenyataan bahwa inflasi nasional merupakan agregasi dinamika pembentukan harga yang terjadi di daerah.

Terciptanya inflasi yang rendah dan stabil di daerah pada gilirannya akan meningkatkan daya saing dan dapat lebih menjamin kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, berbagai permasalahan struktural yang masih terjadi seperti konektivitas yang rendah, struktur pasar yang terdistorsi,

kesenjangan informasi harga dan produksi pangan menyebabkan pergerakan inflasi sangat rentan berfluktuasi. Efisiensi perekonomian daerah yang berbeda antara kawasan barat dan kawasan timur juga menyebabkan terjadinya disparitas harga yang cukup besar.

Dalam rentang 10 tahun terakhir dapat terlihat bahwa pergerakan inflasi yang signifikan lebih disebabkan oleh faktor adanya penyesuaian kebijakan pemerintah terkait harga barang yang disubsidi/diatur pemerintah (*administered prices*) dan lonjakan harga komoditas pangan (*volatile foods*). Karakteristik inflasi yang banyak dipengaruhi oleh faktor kejutan di sisi pasokan (*supply side*) tersebut, menyebabkan upaya untuk mencapai inflasi yang rendah dan stabil tidak cukup hanya melalui kebijakan moneter, melainkan diperlukan adanya suatu paduan kebijakan yang harmonis antara kebijakan moneter dan kebijakan fiskal (*mix policies*), kebijakan sektoral, dan kebijakan pemerintah daerah itu sendiri.

Hal inilah yang menjadi latar belakang ditempuhnya strategi penguatan koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah di tingkat pusat melalui pembentukan Tim Pengendalian Inflasi (TPI) hingga Pemerintah Daerah dalam wadah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Keberadaan forum koordinasi dalam wadah TPID di berbagai daerah menjadi sangat strategis di tengah semakin besarnya kewenangan daerah dalam pelaksanaan pembangunan. TPID perlu diperkuat dengan mengintensifkan fungsi dan tugasnya tidak hanya memantau pergerakan inflasi di 82 kota-kota di Indonesia tetapi perlu membuat kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi masalah sisi penawaran/pasokan (*supply side shocks*).



## INDEKS

### A

Administered Prices x, 137  
Anomali 5, 62, 137  
APBD 34, 56, 57, 84, 87, 133, 137  
ARIMA 117, 118, 120, 121, 122,  
124, 130, 137  
ASEAN 6, 7, 137, 146, 149  
Asimetris 137

### B

Bank Indonesia vi, vii, 4, 38, 40,  
41, 42, 43, 46, 48, 59, 64,  
67, 68, 73, 80, 81, 83, 94,  
100, 104, 107, 110, 111,  
114, 123, 127, 129, 135,  
137, 146, 147, 148  
Base effect 137  
BBM x, 4, 5, 6, 21, 33, 40, 41, 45,  
59, 69, 79, 80, 81, 90, 102,  
108, 110, 112, 113, 116,  
127, 130, 137, 145  
Belanja Daerah 84, 87, 88, 133,  
137  
Beras 6, 63, 137

BPS viii, ix, 14, 15, 34, 35, 42, 49,  
50, 52, 53, 66, 68, 78, 87,  
88, 93, 99, 101, 109, 112,  
114, 118, 137  
BULOG 21, 22, 26, 60, 131, 132,  
137

### C

Cost push inflation 138  
CPI viii, 77, 101, 138

### D

DAU 87, 88, 89, 90, 133, 134, 138  
Deflasi; 138  
Demand pull inflation 138  
Desentralisasi Fiskal 73, 89, 92,  
138  
Determinan 138  
Determinasi inflasi 138  
Diagnostik 121, 138  
Distribusi 59, 84, 93, 138  
DOC 80, 138  
Domestik viii, 36, 138

## **E**

Eceran 85, 138  
Efektivitas 138  
Ekonometri 138  
Ekspektasi 84, 102, 138, 147  
Eksternal 138, 147  
Estimasi 118, 120, 138

## **F**

Fluktuasi 9, 14, 16, 18, 22, 139  
Fluktuatif 139  
Forecasting 97, 122, 123, 126, 139

## **G**

Gabah 139  
GDP 98, 125, 139  
Global v, 139

## **H**

Harga iii, vii, viii, x, xi, 3, 6, 7, 8, 9,  
14, 15, 29, 30, 33, 35, 45,  
46, 52, 57, 62, 63, 69, 84,  
85, 86, 93, 101, 103, 108,  
139  
Hasil Pertanian 139  
Hyperinflation viii, 139

## **I**

IHK viii, ix, 3, 4, 35, 36, 40, 49, 50,  
52, 53, 68, 77, 101, 104,  
139

IHPB viii, ix, 35, 36, 77, 139

IMF 22, 139

Impor 63, 139

Inflasi; 139

Inflasi Inti 101, 139

Inflasi Non Inti 101, 139

Infrastruktur 140

Insentif 140

Institusi 140

Irigasi 140

## **J**

Jalur 46, 54, 140

Jasa 42, 46, 68, 140

Jual 140

## **K**

Kebijakan fiskal 38, 140

Kebijakan moneter 38, 40, 73, 140

Ketidakpastian 140

Kluster 140

Koefisien 14, 15, 17, 140

Komoditas 6, 29, 140

Konektivitas 140

Konsumen viii, 3, 15, 35, 52, 93,  
101, 140

## **L**

Logistik 21, 51, 140

## **M**

Makroekonomi 28, 107, 125, 140,  
147

Minyak goreng 141

## **N**

Neraca Pangan 82, 141

Nilai tukar 141

## **O**

Operasi pasar 21, 141

Output 141

## **P**

PAD 87, 133, 141

Pangan iii, vii, xi, 3, 6, 7, 8, 9, 10,  
22, 24, 25, 26, 27, 28, 29,  
30, 45, 46, 57, 60, 61, 63,  
67, 69, 82, 86, 111, 129,  
131, 132, 141

Pasar 30, 42, 46, 83, 84, 141

Pasokan 59, 83, 141

PDB viii, ix, 36, 47, 77, 141

Pedagang; 141

Pemda 35, 42, 51, 141

Philips Curve 104, 141

Policy maker 141

Produksi 84, 141

Produsen 141

## **R**

Random 141

Rantai 142

Reformasi 142

Residual 121, 142

Risiko 142

## **S**

Shock 142

Stabilisator 142

Stabilitas harga 9, 142

Stagflasi 142

Struktur 30, 59, 142, 145

Subsidi 3, 28, 97, 110, 127, 142,  
145, 147

Supply 45, 69, 142

## **T**

Tarif 33, 142

TPI vi, 6, 17, 29, 40, 41, 42, 65,  
135, 142

TPID vi, 34, 35, 42, 43, 45, 47, 55,  
56, 57, 58, 65, 68, 69, 77,  
81, 82, 83, 84, 85, 86, 110,  
113, 114, 115, 116, 124,  
129, 130, 135, 142

Transportasi 36, 142

**U**

uang beredar 38, 105, 106, 107,  
142

Uncertainty 142

upah ix, xi, 44, 81, 142

Usaha 21, 22, 25, 131, 143, 147

**V**

Volatile Food x, 143

Volatilitas 143

Volume barang 143

**W**

White noise 143

## BIOGRAFI PENULIS

**Edmira Rivani**, menyelesaikan studi S1 pada jurusan Statistika – Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran, dan melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana (S2) pada Jurusan Statistika Terapan – Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI mulai tahun 2009 sebagai Peneliti Ekonomi dan Kebijakan Publik di Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI). Tahun 2011 penulis terlibat dalam penyusunan dan pembahasan RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat, kemudian pada tahun 2015 penulis terlibat dalam penyusunan RUU tentang Minyak dan Gas. Beberapa topik penelitian tentang ekonomi dan kebijakan publik telah dilakukan penulis seperti: Kebijakan Sektor Pertanian dan Pemberdayaan Petani, Pembiayaan Dalam Perumahan Rakyat: Studi Implementasi Rancangan Undang-Undang Tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Pembentukan Kawasan Pariwisata Khusus Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pariwisata Nasional, Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah Otonomi Baru, Strategi Kebijakan Pengendalian Inflasi Di Daerah Pasca Kebijakan Baru Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), dll. Penulis juga menghasilkan beberapa karya tulis ilmiah tentang ekonomi dan kebijakan publik telah dihasilkan seperti: Perubahan Struktur Ekonomi Tenaga Kerja dan Analisis *Multidimensional Scaling* (MDS) Dalam Mengelompokkan Penyerapan Tenaga Kerja di Berbagai Provinsi (2014), Peningkatan Daya Saing Industri Indonesia Dalam

Menghadapi ASEAN *China Free Trade Area* (2015), Peran Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Berkelanjutan (2015), dll. Penulis dapat dihubungi melalui *e-mail*: [edmira.rivani@dpr.go.id](mailto:edmira.rivani@dpr.go.id) atau [rif\\_green@yahoo.com](mailto:rif_green@yahoo.com).

**Juli Panglima Saragih.** Lahir di Tebing Tinggi Sumatera Utara, 21 Juli 1964. Menyelesaikan pendidikan S1 di FISIP Universitas Padjadjaran tahun 1988 dan Magister Manajemen di Universitas Nusantara pada tahun 1999. Penulis bekerja di Setjen DPR RI sejak tahun 1990. Menjadi anggota tim asistensi untuk penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti Monopoli, RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, RUU Koperasi, RUU Lembaga Keuangan Mikro. Beberapa jurnal ilmiah nasional dan buku yang sudah dipublikasikan antara lain: Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi, Sejarah Perminyakan di Indonesia, Kebijakan Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro: Urgensi dan Permasalahannya, Kebijakan Sektor Kehutanan dan Pengembangan Industri Pulp dan Kertas di Indonesia, Kebijakan Upah Nasional dan Kesejahteraan Pekerja. Penulis dapat dihubungi melalui alamat *e-mail* : [julipsaragih@gmail.com](mailto:julipsaragih@gmail.com).

**Rasbin.** Penulis menyelesaikan pendidikan sarjana di Institut Pertanian Bogor Jurusan Teknologi Industri Pertanian pada tahun 2005. Gelar Magister Sains Ekonomi diperoleh dari Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia dengan kekhususan Ekonomi Moneter dan Perbankan pada tahun 2008. Penulis pernah terlibat dalam beberapa proyek penelitian di lingkungan Universitas Indonesia sebagai asisten peneliti dan *research fellow* di Direktorat Internasional Bank Indonesia. Penulis juga aktif sebagai asisten dosen di Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi dan Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia juga sebagai dosen tetap di Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Saat ini Penulis merupakan peneliti muda bidang ekonomi dan kebijakan publik di lingkungan

Badan Keahlian DPR RI. Saat ini Penulis juga terdaftar sebagai mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. Tahun 2016, penulis juga terlibat dalam penyusunan RUU tentang Bank Indonesia dan terlibat dalam pembahasan UU Tentang Pengampunan Pajak. Adapun beberapa tulisan yang pernah dibuat oleh Penulis antara lain: Hubungan Kausal Dinamis Antarvariabel Makroekonomi di Indonesia dalam Kajian Krisis Ekonomi sebagai Kejutan Eksternal, Indikator Kualitas Pertumbuhan Ekonomi: Pertumbuhan Sektor Industri Dan Penyerapan Tenaga Kerja, Analisis *Shocks* Kebijakan Moneter dalam Perekonomian Terbuka: Kasus Dua Sektor Ekonomi di Indonesia, Ekspektasi Potensi *Underground Economy* di Indonesia, Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Non Performing Loans* Sektor-sektor Ekonomi di Indonesia, *Factors Affecting The Community Welfare of Seven Expanded Provinces in Indonesia*, Strategi Antisipasi Efek Krisis Ekonomi terhadap Perekonomian Indonesia, Analisis Pengaruh Kredit Sektoral, Suku Bunga Kredit, dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektoral di Indonesia tahun 2005 – 2010: Pendekatan Panel Data, Gejala Deindustrialisasi dan Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia, Lembaga Keuangan Mikro sebagai Upaya Peningkatan Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Pembangunan Nasional, dan Subsidi dan Upaya Peningkatan Daya Saing Ekspor Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Penulis dapat dihubungi melalui alamat e-mail: [ras9bin@yahoo.co.id](mailto:ras9bin@yahoo.co.id).

**Ari Mulianta Ginting**, adalah Peneliti Muda bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik dengan bidang konsentrasi Ekonomi Terapan. Lahir di Jakarta, 2 Mei 1981. Pendidikan Sarjana Manajemen Keuangan diselesaikan di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 2006. Magister Ilmu Ekonomi diperoleh dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 2008 dengan kekhususan Ilmu Ekonomi dengan

konsentrasi Ilmu Ekonomi Moneter. Bekerja di Sekertariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mulai tahun 2009 sebagai Peneliti Muda Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik dengan konsentrasi kepakaran Ekonomi Terapan pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Tahun 2015 penulis terlibat bersama dengan Biro Perancang Undang-Undang dalam penyusunan RUU tentang, Daerah Kepulauan, Bank Indonesia, dan Ekonomi Kreatif. Penulis juga terlibat dalam penelitian kelompok Tim Ekonomi dan Kebijakan Publik, dengan berbagai topik diantaranya tahun 2015, penulis ikut dalam penelitian Kelompok dengan topik Pengaruh strategi kebijakan pengendalian inflasi di daerah pasca kebijakan baru subsidi bahan bakar minyak (Studi Kasus di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Papua Barat). Dan tahun 2016 penulis terlibat penelitian kelompok dengan Topik Ekonomi Kreatif. Pada tahun yang sama melakukan penelitian individu dengan topik yang berkaitan dengan pengaruh dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi. Penulis juga bekerja sebagai Dosen Honorer untuk Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Katholik Atmajaya, Jakarta. Serta Penulis juga menjadi dosen tidak tetap untuk mata kuliah Pengantar Mikro di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pelita Harapan (UPH). Penulis dapat dihubungi melalui alamat *e-mail* : *ari.ginting@dpr.go.id*

## BIOGRAFI EDITOR

**Prof.Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph. D., APU.** adalah Profesor Riset Bidang Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) dan Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Tarumanagara (UNTAR). Lahir di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1957. Gelar Sarjana di peroleh dari Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1981. Kemudian melanjutkan kejenjang *Master Degree di bidang Agricultural Development Economics* (MADE) dari *Australian National University*, Canberra, Australia pada tahun 1986. Kemudian meraih Ph.D bidang Ilmu Ekonomi dari *University of Queensland*, St. Lucia, Brisbane-Australia padatahun 1992. Tahun 1995-1996, menjadi Staf Ahli Khusus Menteri Sekretaris Negara dalam pembuatan materi PidatoPresiden RI bidang Ekonomi. Kemudian tahun 1997-2001 menjadi Kepala Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI. Tahun 2001-2002 menjadi Staf Ahli bidangEkonomi, Dewan Ketahanan Nasional. Tahun 2005-2010 menjadi Deputy Menteri Riset dan Teknologi (Ristek) pada Bidang Dinamika Masyarakat dan *President of Non-Align Movement for Science and Technology* (NAM), serta *Chairman of ASEAN Committee on Science and Technology* (ASEAN-COST).

Pengabdianannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ekonomi mencakup antara lain: (a) penelitian dalam bidang ekonomi pembangunan, makro ekonomi danekonomi internasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); (b) Konsultan penelitian *Asian Development Bank* (ADB), *United Nation for Economic and Social for Asia and Pacific* (UN-ESCAP),

*International Labour Organization (ILO)*, UNDP, UNCTAD, UNSFIR, ISEAS, ISIS dan *World Bank*; (c) Dosen dan pembimbing mahasiswa program S1, S2, dan S3, untuk mahasiswa di beberapa Universitas seperti UI, IPB, UNPAD, dan UNTAR; (d) Mitra Bestari Buletin Ilmiah Perdagangan, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Sekretariat Jenderal DPR-RI dan Jurnal Standarisasi, BSN; (e) Redaktur Jurnal Ekonomi UNTAR dan Jurnal Ekonomi dan Pembangunan LIPI; (f) sejak tahun 2008 menjadi *Editorial Member of Journal of Social and Economic Science, International Journal of Development Research and Quantitative Techniques* dan *International Journal of Economics and Business Studies*, New York, USA; (g) Editor dari berbagai Jurnal Ekonomi; (h) Penyunting dari berbagai buku dan prosiding bertemakan ekonomi; dan (i) *Coordinator East Asian Development Network (EADN)* untuk Indonesia dan anggota *Think Tank Asian Development Bank (ADB)* sejak tahun 2010.

Berbagai karya ilmiah baik dalam bentuk jurnal telah diterbitkan antara lain dalam *Review of Asian Development Bank (ADB)*, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *Institute for Southeast Asian Studies (ISEAS)*, ILO dan UN ESCAP. Demikian pula dengan buku hasil penelitian yang diterbitkan oleh UN ESCAP, ILO, UNSFIR, UNDP dan ADB serta penerbit internasional lainnya. Alamat email yang dapat dihubungi adalah *cmfirdausy@gmail.com* dan *carunia\_firdausy@yahoo.com*.



## Perkembangan Inflasi dan Peran Pemerintah Daerah

Inflasi merupakan salah satu masalah yang dapat mengganggu keberlanjutan perekonomian suatu negara. Indonesia telah beberapa kali menghadapi masalah inflasi dan nyaris membangkrutkan perekonomian nasional. Pengalaman inflasi buruk dimaksud yakni pada saat Indonesia mengalami empat krisis. Pertama, inflasi sebagai akibat krisis ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1960, tepatnya pada tahun 1964 yang mencapai angka 135 persen, kemudian meningkat lebih parah lagi mencapai hampir 600 persen tahun 1965. Kedua, inflasi sebagai akibat krisis ekonomi pasca-era bom minyak bumi tahun 1982. Ketiga, inflasi yang terjadi sebagai akibat krisis keuangan Asia tahun 1997/1998. Keempat, inflasi sebagai akibat bangkrutnya institusi keuangan global *Lehman Brothers* pada tahun 2008 atau yang dikenal dengan *Global Financial Crisis* (Baca Thee KianWie, 2010).

Pemerintah dan Bank Indonesia kini telah membentuk Tim Pemantauan dan Pengendali Inflasi (TPI) di level pusat sejak tahun 2005. Penguatan koordinasi kemudian dilanjutkan dengan membentuk Tim Pengendali Inflasi di level daerah (TPID) pada tahun 2008. Selanjutnya, untuk menjembatani tugas dan peran TPI di level pusat dan TPID di daerah, maka pada bulan Juli 2011 dibentuk Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID yang diharapkan dapat menjadi katalisator yang dapat memperkuat efektivitas peran TPID. Keanggotaan Pokjanas TPID ini adalah Bank Indonesia, Kemenko Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri (Bank Indonesia, 2015).

Secara lebih spesifik buku ini bertujuan mendiskusikan dan membahas empat (4) issue terkait inflasi. Keempat isu dimaksud adalah sebagai berikut. Pertama, menyangkut strategi kebijakan pengelolaan dan forecasting inflasi di daerah. Kedua, berkaitan dengan Stabilisasi Harga Pangan Dalam Rangka Mengendalikan Inflasi. Ketiga, isu terkait pengendalian inflasi daerah dan desentralisasi fiskal. Keempat, menyangkut kebijakan dan peran pemerintah daerah dalam mengurangi inflasi.



Diterbitkan oleh:  
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
dan PT Balai Pustaka (Persero)

